



ORANG-ORANG

DiBalik Gratifikasi Sang Bupati

SUKADANA, SP - Program Pengadaan Jaringan Listrik pada beberapa desa di wilayah Kabupaten Kayong Utara (KKU) diduga ada gratifikasi mengalir kepada Bupati dan salah satu orang terdekatnya.

Salah seorang warga Kayong Utara, yang minta

namanya disamarkan, sebut saja Ujang menuturkan hal ini diketahuinya, setelah banyaknya pemberitaan di beberapa Media lokal yang membahas rusaknya genset di Desa Betok Jaya, Pulau Karimata, yang baru sebulan diresmikan oleh Bupati Kayong Utara, Citra Duani

• Baca Halaman 7



Ujang
Pelapor Gratifikasi

Bisanya Alex mendapatkan proyek tersebut, dengan memberikan satu unit mobil kepada Citra Duani dan Iswari. Yang mana mobil yang didapat oleh Citra Duani tersebut, sekarang sering dipakai di Kabupaten Kayong Utara, yang berjenis Fortuner berwarna putih. Sedangkan milik Iswari berada di Pontianak.



Soleh
Anggota DPRD KCU

Pansus dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah (Bamus), hasil konsultasi Pimpinan DPRD dengan Alat Kelengkapan DPRD atau memperhatikan rencana kerja tahunan DPRD



Hal 1 ■ di balik

pada 6 April 2019.

Lebih jauh dirinya menjelaskan, pengadaan mesin listrik tersebut, tidak hanya di Desa Betok Jaya saja, tapi menyebar di wilayah Kayong Utara, diantaranya Desa Padang dan Desa Pelapis di Kecamatan Kepulauan Karimata, Desa Dusun Kecil Kecamatan Pulau Maya. Kemudian di Desa Matan Jaya dan Desa Lubuk Baru, Kecamatan Simpang Hilir.

"Desa Pelapis, pada tahun 2019 gagal dilaksanakan, dan dianggarkan lagi pada tahun ini melalui AP-BDes. Untuk di Desa Dusun Besar dan Desa Matan Jaya proyeknya gagal. Kemudian di lubuk batu hanya KWH nya saja yang terpasang, tapi tak ada di manfaatkan," terang Ujang.

Proyek pengadaan jaringan aliran listrik di daerah-daerah terpencil tersebut, sambungnya digarap oleh PT Raja Intan Electrical melalui Alex Sumarto asal Kabupaten Ketapang selaku pihak ketiga. Perkenalan Alex dengan Bupati Citra Duani ini difasilitasi oleh salah seorang kepercayaan Bupati yang bernama Iswari.

Ujang menerangkan kembali, dirinya merasa heran dengan digandengnya PT. Raja Intan milik

Alek tersebut. Pada era kepemimpinan Hildi Hamid, dirinya mengetahui bahwa Alek juga pernah mengajukan kerjasama, tetapi tidak dipenuhi oleh Hildi Hamid.

"Saya pernah melihat di Istana Rakyat, Alex bersama Iswari diperkenalkan dengan Citra Duani. Padahal waktu Bupati Hildi Hamid, Alex ini tidak dipakai," imbuhnya.

Dari sini, menurut Ujang awal perkenalan Bupati Citra Duani dengan Alex. Penawaran yang dilakukan Alex kepada pihak Desa khususnya adalah dengan menyediakan terlebih dahulu segala keperluan agar listriknya bisa mengalir.

Seperti misalnya di Desa Betok Jaya, Kecamatan Kepulauan Karimata, yang harga Gensetnya senilai Rp450 Juta Rupiah ditalangkan terlebih dahulu oleh Alex.

"Dari merek Genset yang saya liat di Desa Betok Jaya, kemudian saya coba cek di Surabaya melalui seorang teman, harganya tidak mencapai Rp200 jutaan," paparnya.

"Bisanya Alex mendapatkan proyek tersebut, dengan memberikan satu unit mobil kepada Citra Duani dan Iswari. Yang mana mobil yang didapat oleh Citra Duani tersebut, sekarang

sering dipakai di Kabupaten Kayong Utara, yang berjenis Fortuner berwarna putih. Sedangkan milik Iswari berada di Pontianak," lanjut Ujang.

Ujang juga menyampaikan, untuk pengadaan listrik di Desa Pelapis senilai 1 milyar rupiah. Yang pada tahun ini sudah dianggarkan. Dirinya berharap persoalan ini bisa ditindaklanjuti oleh lembaga terkait. Mengingat keperluan masyarakat akan listrik di daerah terpencil sangat diperlukan.

"Saya berharap lembaga terkait bisa mengusut persoalan ini, sebab masyarakat sangat mendambakan listrik. Jangan sampai ada kongkaling, sehingga pengadaan genset asal-asal saja," harapnya.

Bentuk Pansus

Anggota DPRD Kayong Utara, Soleh, saat dimintakan keterangannya menyampaikan, jika memang telah terjadi dugaan gratifikasi yang dilakukan, maka dirinya akan mengusulkan kepada unsur pimpinan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus).

Pansus ini, lanjut Soleh, merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Pansus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu

yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian.

"Pansus dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah (Bamus), hasil konsultasi Pimpinan DPRD dengan Alat Kelengkapan DPRD atau memperhatikan rencana kerja tahunan DPRD," papar Soleh.

Dilanjutkan Soleh, perlu ada kepanitiaan khusus di DPRD dalam membantu menyelesaikan kasus tersebut. Prioritas utama DPRD ialah memperjelas status keuangan pengadaan barang tersebut.

"Selain itu, juga bagaimana kita bisa mencari solusi dari persoalan yang ada, sehingga kasus seperti ini bisa terjadi. gunanya adalah mencegah potensi terjadinya kasus yang serupa di masa depan," ungkapanya.

Iswari, yang dihubungi melalui telepon, enggan berkomentar lebih banyak. Ia membantah keterlibatannya pada proyek tersebut. Namun, ia meminta waktu untuk menjelaskan duduk persoalan, setelah kembali dari dinas luar di Singkawang. (rif/mul)

SUARA PEMRED

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des

2020

Hal.: 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat